

PIDATO ILMIAH

PENGUKUHAN GURU BESAR

DILEMA UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH
DALAM ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

OLEH : Prof. Dr. rer. pol. PATTA TOPE, SE

Disampaikan pada
Pengukuhan Guru Besar Ekonomi Publik dan Ekonomi Internasional
Dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Tadulako pada
tanggal 19 Agustus 2006



Prof. Dr. rer. pol. PATTA TOPE, SE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.

Yang Terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Dewan Penyantun,

Yang Kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako selaku ketua senat,

Yang kami muliakan Guru Besar dan para anggota senat Universitas Tadulako,

Yang kami hormati para pembantu rektor dan dekan-dekan fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako,

Anggota Muspida Propinsi Sulawesi Tengah yang saya hormati,

Bupati dan Wali Kota se Sulawesi Tengah yang saya hormati,

Pimpinan Perguruan Tinggi Se Kota Palu, Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen seluruh civitas akademika Universitas Tadulako serta Sahabat, kolega dan para undangan yang saya hormati.

Dengan penuh rasa hormat saya mengajak kepada kita semua untuk bermunajat kehadirat Allah SWT atas karunia dan anugerah yang telah diberikanNya, sehingga hari ini kita diberi kesempatan menghadiri acara Dies Natalis Universitas Tadulako yang ke 25 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Publik dan Ekonomi Internasional

DILEMA UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH DALAM ANGGARAN SEKTOR PUBLIK¹

1. Pengantar

Dalam kesempatan yang teramat khusus ini, saya tidak akan membahas tentang pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah. Bahkan saya tidak berniat untuk mengulas tentang visi-misi pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang mungkin merupakan fokus perhatian utama para dewan penyantun dan guru besar serta hadirin pada dies natalis ini. Buat saya itu semua bukanlah tujuan terpenting dalam kesempatan ini, lalu apa yang saya akan angkat sebagai topik utama?

Dalam momentum ini ada baiknya kita menengok lebih luas tentang utang luar negeri pemerintah dan anggaran sektor publik negara kita. Pertanyaan krusial yang timbul adalah, adakah kaitan antara utang luar negeri pemerintah di satu sisi dengan anggaran sektor publik di sisi lainnya. Jawabannya tentu saja tidak bisa dikatakan tidak karena utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor yang mengganggu operasionalisasi kinerja APBN. Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negatif sejak pertengahan 1980-an. Ketika itu, terjadi transfer negatif pada neraca pembayaran. Utang pokok dan bunga yang dibayar kepada negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar dari pinjaman luar negeri yang diterima oleh pemerintah.

Pada sisi lain, jika kita menganalisis APBN dan neraca transaksi berjalan sampai saat ini, penyebab kenapa pemerintah harus berutang, jawabannya adalah karena kesenjangan antara investasi dan tabungan pemerintah serta kesenjangan defisit neraca transaksi berjalan. Oleh karena itu upaya meningkatkan tabungan

¹ Disampaikan pada pengukuhan Guru Besar Ekonomi Publik dan Ekonomi Internasional Dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Tadulako pada tanggal 19 Agustus 2006

menjadi sangat penting untuk keluar dari perangkap utang. Selain itu agar neraca transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat maka kinerja ekspor mesti ditingkatkan.

Hubungan utang luar negeri dengan anggaran pemerintah pada dimensi APBN kita, sampai saat ini sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran pemerintahan yang normal. APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri, merupakan simbol ketidakwajaran dari instrumen kebijakan ekonomi negara ini. Pada satu sisi, utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak memiliki ruang gerak memadai untuk melakukan ekspansi investasi. Anggaran pengeluaran di negeri ini hampir habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar negeri. Dalam kondisi seperti ini resep Keynes yaitu mendongkrak permintaan melalui defisit fiskal tentu tidak akan memecahkan masalah. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang menstimulir perekonomian dari sisi permintaan bukan suatu hal yang mudah. Stimulasi melalui kebijaksanaan fiskal mempunyai ruang gerak yang terbatas karena beban utang pemerintah yang sangat besar.

2. Efek Hutang Luar Negeri Pemerintah

Menyadari bahwa hadirin adalah hamba Allah yang maha terdidik, maka saya tidak perlu ragu untuk membahas lebih mendalam tentang utang luar negeri pemerintah yang telah membebani APBN kita.

Menurut hemat saya, secara substansial utang luar negeri pemerintah hingga kini, dapat dibagi ke dalam dua golongan:

1. Golongan pertama adalah permintaan yang proporsional berdasarkan perhitungan matang dan cermat, terkait dengan peningkatan kapasitas produksi nasional, dan efek *repayment* yang baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pembayaran utang yang tepat pada waktunya dan dapat mendatangkan *fee* bagi negara.

2. Golongan kedua adalah komponen permintaan yang tidak proporsional yang banyak dipengaruhi oleh perilaku elite, birokrasi, termasuk unsur korupsi dan kekuasaan. Realitas ini terlihat dari pembayaran utang yang tidak tepat pada waktunya dan mendatangkan kerugian bagi negara.

Hadirin yang saya hormati

Dengan demikian transaksi utang luar negeri di Indonesia selama ini mengalami distorsi sehingga menimbulkan permintaan berlebihan (*excess demand*), yang menurut pengamatan kami bersumber dari perilaku penentu kebijakan dan birokrasi yang boros. Permintaan utang luar negeri berlebihan diakibatkan oleh kelembagaan yang mendukung proses kebijakan dan transaksi utang luar negeri dalam implikasinya berjalan tidak sehat dan tidak efisien. Kelebihan permintaan tersebut akhirnya menimbulkan kemampuan membayar yang lemah sehingga tidak tepat waktu dan menyebabkan kerugian negara. Potensi untuk memperbaiki mekanisme kebijakan publik tersebut terhambat karena upaya pemerintahan sampai kini masih sangat *represif* dalam penanganan utang luar negeri. Akibatnya jika kita tilik proyek yang dibiayai oleh utang luar negeri, seperti fenomena gunung es, ada ratusan bahkan ribuan proyek yang berjalan dengan anggaran dari utang luar negeri pemerintah penuh dengan praktek korupsi, "*mark up*", dan perburuan rente. Proyek-proyek menjadi tidak efisien dan negara menanggungnya dengan beban pembayaran yang mahal dan mencekik.

Implikasi dari pinjaman luar negeri yang tidak efisien di negara kita adalah beban utang semakin besar karena penundaan pembayaran sehingga terjadi pengalihan dana investasi untuk cicilan. Potensi fiskal untuk investasi pembangunan langsung hilang karena potensi anggaran tersebut harus dialihkan untuk pembayaran bunga dan cicilan utang khususnya utang luar negeri. Itu berarti ada sumberdaya yang hilang, padahal seharusnya potensial sebagai injeksi dalam memacu pertumbuhan ekonomi kita.

Kondisi fiskal yang berat pada masa mendatang akan diikuti oleh kontraksi dengan cara peningkatan pajak berlebihan. Dalam kondisi seperti ini tidaklah mengherankan jika sebahagian besar penerimaan pajak dikeluarkan untuk anggaran pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi rakyat membayar pajak buat pembayaran utang sehingga umumnya penghasilan dari pajak ini tidak bergulir untuk investasi langsung.

Dalam situasi *emergency* saat ini, maka ada baiknya pemerintah berbicara dengan nurani. Apakah layak hak rakyat terhadap anggaran musnah untuk membayar utang luar negeri yang najis² (Odious Debts) tersebut? Jadi, mesti dihindari kegenitan retorika teknokrat yang hampa politik, dengan mengajukan secara tegas keputusan yang berpihak pada rakyat.

3. Beban Berat APBN

APBN pada tahun 2006 sebesar Rp.625,2 trilyun dengan pemasukan pajak sebesar Rp.416,3 trilyun. Peningkatan penerimaan dari pajak sebesar 20 persen dari tahun 2005 (Rp.346,8 triliun) cukup menggembirakan kita semua. *Tax ratio* masyarakat Indonesia telah meningkat dari 13,2 persen pada tahun 2005 menjadi 13,7 persen pada tahun 2006, tetapi hanya tersisa sangat sedikit untuk pembiayaan pembangunan langsung. Peningkatan pajak tersebut masih menimbulkan kesulitan untuk melakukan ekspansi investasi pemerintah, karena anggaran negara terkuras untuk pembayaran utang khususnya utang luar negeri pemerintah. Hak masyarakat atas anggaran publik dikebiri sehingga akses terhadap program kesehatan, pendidikan, pangan harus dialihkan untuk membiayai utang khususnya utang luar negeri pemerintah maupun cicilannya. Peningkatan deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN untuk APBN) sebesar 23,3 trilyun di tahun 2006 hampir terkuras untuk membayar utang luar negeri

² Utang najis adalah utang yang diberikan negara donor atau lembaga multilateral, namun tidak digunakan untuk keperluan pembangunan atau dengan kata lain utang tersebut tidak sampai ke tangan rakyat sehingga sah apabila utang ini tidak dibayar sebagai suatu utang pemerintah

pemerintah yang saat ini berjumlah USD 78 miliar. Belum lagi beban utang domestik dan pengeluaran rutin lainnya, yang tidak bisa dihindari.

Jadi kunci persoalan adalah beban utang luar negeri, yang telah melampaui batas kemampuan kita untuk melayaninya. Bahkan jumlah beban pembayaran utang tersebut telah memasung hak ekonomi masyarakat luas atas anggaran publiknya. Departemen Keuangan menghitung cicilan pokok sebesar Rp. 76,6 trilyun pada tahun 2006 atau 12,25 persen anggaran akan habis untuk pembayaran utang pokok dan bunganya. Angka itu lima kali lipat dari jumlah bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada rakyat miskin sepanjang 2006 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Tidak heran jika dikatakan bahwa utang luar negeri pemerintah adalah kanker bagi APBN selama puluhan tahun terakhir. Pengurangan stok utang luar negeri pemerintah harus menjadi salah satu objektif untuk meningkatkan kapasitas APBN.

Memang perlu kita syukuri bahwa sekarang ini utang luar negeri Indonesia dalam keadaan layak karena *debt sustainability* yang mengacu pada rasio total utang terhadap PDB makin rendah nilainya, yang menggambarkan secara teroris semakin sehatnya keadaan utang negara kita. Rasio stok utang baik utang luar negeri maupun dalam negeri terhadap PDB tahun 2005 adalah 38,5 persen, dan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan keadaan tahun 2000 di mana rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 51,70 persen. Namun menekan rasio utang terhadap PDB bukannya tanpa biaya.

Hadirin yang saya hormati

Apa saja biaya yang harus dikeluarkan? Sebuah studi oleh Morris Goldstein menyatakan bahwa ongkosnya sering kali berupa perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa negara pengutang memiliki cukup surplus untuk membayar utang luar negerinya, dan memastikan bahwa pembayaran utang tidak akan mengganggu pertumbuhan. Kebijakan umum diambil adalah dengan menerapkan suku bunga yang tinggi dan kebijakan fiskal yang ketat terutama pungutan pajak

yang tinggi sehingga ada cukup sumber dana untuk membayar utang. Menurut Goldstein, kebijakan seperti ini di negara yang mengalami krisis akan berdampak negatif pada pertumbuhan dan juga pada ketidakstabilan politik, terutama apabila negara tersebut diperintah oleh pemerintahan koalisi dan APBN merupakan hal yang selalu diperdebatkan. Tanda-tanda hasil penelitian ini kelihatannya sedikit banyaknya telah nampak di negara kita. Ekspansi pajak pada tahun 2006 telah berakibat pada lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini (sekitar 5 persen) dibandingkan dengan tahun 2005.

Pemerintah tidak boleh bermain-main dengan nasib rakyat. Karena rakyat mempunyai hak mutlak terhadap anggaran publik tersebut. Tetapi praktek kebijakan publik dan implementasi anggaran dari regim yang korup telah menghilangkan kesempatan tersebut. Tim ekonomi pemerintah saat ini idealnya tidak hanya mempunyai visi teknis fiskal belaka, tetapi harus mempunyai visi ekonomi politik untuk membela kepentingan masyarakat luas. Sebab selama ini tim ekonomi pemerintah hanya memandang utang merupakan kewajiban negara untuk membayarnya. Untuk itu tim ekonomi mempunyai tugas membebaskan sebagian beban utang khususnya utang luar negeri pemerintah, yang merupakan produk dari praktek kebijakan yang distortif dan praktek korupsi yang meluas pada masa regim yang lalu. Korupsi di sini termasuk birokrat asing, yang juga sangat menikmati keuntungan super normal dari proyek-proyek utang luar negeri, yang biasa di- "*mark up*". Usaha diplomasi untuk membagi beban resiko di masa lalu harus dilakukan sehingga resiko kesalahan rancangan utang dan kesalahan prakteknya di lapangan tidak hanya dibebankan kepada pihak Indonesia.

Upaya tim ekonomi menerbitkan Surat Utang Nasional (SUN) untuk mengurangi beban APBN dalam memperkuat kapasitas sektor keuangan sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekspor dan mempercepat pertumbuhan perlu didukung, tetapi usaha untuk sekedar me-*rescheduling* utang luar negeri harus ditolak karena hanya akan memindahkan beban ke generasi mendatang dengan tambahan

beban bunga. Objektif dari negosiasi utang seharusnya adalah pengurangan stok utang luar negeri. *Rescheduling* bukanlah jalan keluar terbaik dari kemelut utang. Pemerintah Indonesia harus memiliki cukup alasan untuk mengajukan *hair cut* utang luar negeri seperti kasus Nigeria. Negara ini telah melakukan negosiasi politik dengan kreditor asing yang menyebabkan mereka mendapatkan pemotongan utang luar negeri pemerintahnya. Nigeria yang pada bulan Juni tahun ini mendapatkan pemotongan stok utang lebih dari 60 persen dari Paris Club, tidak mengimplementasikan program IMF. Nigeria mencanangkan perang terhadap korupsi, dan membuat program pemulihan ekonomi *National Economic Empowerment and Development Strategy* (NEEDS), tanpa didikte IMF, dengan dukungan Inggris maju ke meja perundingan. Ironisnya pemerintah tetap saja mengikuti resep manajemen utang klasik ala IMF, padahal hal itu terbukti tidak efektif memperbaiki pengelolaan utang Pemerintah Indonesia (*debt sustainability*). Untuk itu pemerintah perlu melakukan diplomasi aktif dalam forum internasional. Diplomasi dimaksud adalah "*smart diplomacy*" yaitu dengan melihat secara jeli peluang perundingan dalam menegosiasikan secara aktif penghapusan atau mereduksi utang debitor miskin.

Pemerintah dan DPR seyogyanya penuh kehati-hatian dalam merencanakan anggaran publik dan harus memiliki konsep yang matang untuk membebaskan APBN pada tahun mendatang dari beban utang yang sudah banyak mengisap hak rakyat. Negara dan masyarakat mempunyai hak untuk tidak membayar sebagian utang yang najis, karena penyimpangan yang dilakukan oleh individu dalam keputusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Pendekatan para teknokrat diharapkan tidak hanya bersifat teknis fiskal belaka, tetapi harus dijalankan dengan menggunakan "*political economy*", melalui tindakan politik, diplomasi ekonomi, dan bahkan tindakan kolektif dari "*stake holders*", yang berkepentingan terhadap APBN.

Jika terjadi transaksi utang individu perusahaan, maka kewajiban pihak yang melakukan transaksi membayarnya. Transaksi utang individu ini berbeda

dengan transaksi utang publik dimana pihak yang tidak memutuskan ikut menanggung resiko dan beban atas kesalahan pengambilan keputusan tersebut. Karena itu, syarat adanya transaksi pada domain publik adalah transparansi, akuntabilitas, dan demokratis.

Utang luar negeri pemerintah adalah keputusan politik, yang berada pada domain publik. Ini berbeda dengan transaksi individu atau pertukaran swasta. Pada kebijakan publik prasyarat-prasyarat keterbukaan, transparansi, demokrasi dan tahapan yang baik merupakan bagian dari elemen yang penting. Jika prasyarat itu tidak ada, maka transaksi tersebut pasti merugikan publik. Utang luar negeri juga merupakan keputusan publik, yang prasyarat-prasyaratnya harus memenuhi standar, dan tidak boleh dijalankan dengan pola pemerintahan yang tertutup dan otoriter.

Transaksi publik yang menyimpang dan dinodai praktek korupsi pemerintah dan birokrasi dapat dituntut untuk tidak dibayar begitu saja. Dalam kasus utang luar negeri pemerintah, praktek korupsi juga dilakukan oleh birokrat asing dan perusahaan pelaksananya. Publik dan masyarakat luas memiliki hak untuk melindungi anggarannya dari praktek seperti itu. Jika dilakukan, maka pemerintah telah memperhatikan hak rakyat atas anggaran, sehingga program kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur sosial, dan pembangunan lainnya bisa dijalankan dengan baik.

3. Kesimpulan

- Penyebab utama permasalahan APBN kita dari tahun ke tahun adalah utang luar negeri pemerintah. Pertama, utang luar negeri pemerintah telah menyebabkan rendahnya kemampuan tabungan pemerintah dalam membiayai pengeluaran pembangunan sehingga pemerintah terus melakukan utang luar negeri untuk menutupi ketidakmampuan tabungan pemerintah. Artinya APBN Indonesia telah terjebak dalam perangkap utang (*debt trap*) dengan gali lubang tutup lubang.

- Kedua, utang luar negeri pemerintah tidak menambah hasil bersih modal asing (netto) yang masuk dalam APBN, tetapi justru negara yang harus membiayai pihak kreditor luar negeri. Terbukti APBN selama ini, negara telah melakukan transfer negatif kepada kreditor asing.
- Ketiga, besarnya beban utang luar negeri pemerintah telah memaksa pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, menekan pos anggaran belanja pegawai, subsidi, dan pengeluaran pembangunan sehingga utang luar negeri pemerintah berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Keempat, akibat utang luar negeri pemerintah, negara diintervensi oleh pihak asing, terutama oleh IMF. Untuk membuat dan menetapkan APBN saja harus mendapatkan persetujuan IMF sehingga pemerintah dan DPR tidak berkutik.
- Jadi jelas utang luar negeri pemerintahlah yang menjadi salah satu penyebab APBN kita mengalami krisis. Maka solusi untuk menghentikan pendarahan APBN (*bleeding*) adalah dengan mencabut permasalahan utang luar negeri pemerintah dari APBN
- Langkah-langkah kebijakan politik ekonomi pemerintahpun sudah seharusnya untuk diubah 180 derajat, yakni dari APBN yang sangat tergantung pada utang luar negeri, tidak mandiri dan memihak asing menjadi APBN yang sepenuhnya digunakan untuk jalannya operasional negara demi kesejahteraan masyarakat.
- Salah satu upaya pengurangan utang (*debt stock*) dapat dilakukan melalui arbitrase internasional. Ide dasarnya adalah pihak kreditor multilateral (IMF, World Bank, dll.) dan bilateral harus ikut bertanggung jawab atas kegagalan mereka didalam ikut mengelola manajemen utang para debitor, sehingga muncul wacana mengenai *odious debt* (utang najis) yang kemudian kreditor memberikan kompensasi berupa pengurangan utang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. P. Binsardi, *The Monetarist Explanation of the Indonesian Balance of Payments*, Research in Monetary Economics, North East Wales Institute, 2005
2. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional - Departemen Keuangan, APBN Th. 2005 – 2006, 2006
3. Departemen Keuangan RI, *Restrukturisasi Suarat Utang SU-002 dan SU-004*, Bahan Rapat dengan Komisi XI DPR RI, 13 Juni 2006
4. Departemen Keuangan RI, *Deviden BUMN*, Bahan Rapat dengan Komisi XI DPR RI, 26 Juni 2006
5. Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Dated Signed 1995-2005)*, Bahan Rapat dengan Komisi XI DPR RI, Juli 2006
6. Hal Hill, *The Indonesian Economy*, Cambridge University Press, 2000
7. James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations And the Rebuilding of Indonesia*, Edward Elgar, 2004
8. Jens P Morfeld, Reiner J Vogl, *Wirtschaftsstandort Indonesien, Der indonesische Inselarchipel als Handels- und Kooperationspartner für deutsche Unternehmen*, J, Kovac, 1998
9. Joseph Stiglitz, *Die Shatteng der Globalisierung*, Printed in Germany, 2002
10. M. Chatib Basri, Pierre Van Der Eng [Ed.] *Business in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, 2004
11. Morris Goldstein, *Safeguarding Prosperity in a Global Financial System*, The Institute for International Economics, 1999
12. Patricia Adams, *Odious Debts, Loose Lending, Corruption and the Third Worlds Environmental Legacy*, Kogan Page 1991
13. Patta Tope, *Die staatliche Erdölindustrie als Instrument zur Verfolgung außenwirtschaftlicher Interessen Indonesiens*, 1998.
14. Patta Tope, *Ekonomi Publik*, Palu 2005
15. Philippe Burger, *Sustainable fiscal policy and economic stability*, Edward Elgar, 2003
16. William V Thompson, Fatin H Horton, *The Debt Trap, How Did We Get In?, How Do We Get Out?* 1999

Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang saya muliakan

Sebelum saya mengakhiri pidato ilmiah ini, perkenankan saya menggunakan sedikit waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendoakan, mendorong, memberi semangat dan membantu saya hingga saya mendapatkan anugerah guru besar ini. Ucapan terima kasih pertama-tama disampaikan kepada bapak Prof. Dr. A. Mattulada, Prof. Dr. Musyi Amal Pagiling, MA, Prof. (Em.) Drs. Aminuddin Ponulele, MS. Dan bapak Drs. Moh. Rasyid M.Si, mantan rektor Universitas Tadulako.

Secara khusus terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Drs. H. Sahabuddin Mustapa, M.Si yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk kegiatan dan proses guru besar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Prof. Dr. Anhulaila MP, SE, M.Si yang telah banyak memberikan dorongan moril dalam pengusulan guru besar saya. Semoga semua itu bernilai ibadah bagi bapak. Juga kepada pegawai administrasi terutama kepada ibu Rafiga Ponulele, SE yang telah banyak membantu saya dari pengusulan hingga pengukuhan guru besar saya, tak lupa kami haturkan banyak terima kasih.

Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dua orang dosen maupun pembimbing saya ketika menyelesaikan program S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, bapak Drs. H. Arifuddin Bidin dan bapak Arsyad Mardani, SE, MP yang telah banyak berjasa selama saya menjadi mahasiswa maupun dosen di Fakultas Ekonomi.

Kepada dosen-dosen saya bapak Prof. Dr. Abdul wahid Syafar, MS, Bapak Thaha Aldjufri, SE, Bapak Prof. Dr. Chairil Anwar serta bapak Jhonny Tanamal, SE, M.Si (dosen wali saya ketika baru masuk di Fakultas Ekonomi) saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada Herr Prof. Dr. Dr.h.c. Peter Friedrich, Herr Prof. Dr. Wilfried Shultz, sebagai

promotor utama dan promotor ketika saya menyelesaikan studi di Universitas Bw. München. Terima kasih juga saya haturkan kepada Herr Prof. Dr. Reiner Marr, Herr Prof. Dr. Bernd Becker, Herr Prof. Dr. Xiao Feng, Herr Prof. Dr. Günter E. Braun, Herr Prof. Dr. W.F. Fischer-Winkelmann, Herr Prof. Dr. Hans Wütrich, Herr Prof. Dr. Arnold Hermanns yang masih terus berkomunikasi dengan saya dan sering mengirimkan saya buku-buku karangannya.

Kepada kolega saya Prof. Dr. Basir Cyo, Prof. Dr. Moh. Hamsun, Dr. H. Djayani, SE, M.Si, Dr. Nersiwat, SE, M.Si, Moh. Ichwan Tandju, M.Kes, Mauled Moelyono, SE, M.Si, Alimuddin Rauf, SE, Eko Jokolelono, SE, Dr. Syahir Natsir, SE, M.Si, Drs Irwan Karim, M.Si, Drs. Tahmidi Lasahido, M.Si, Ahmad Al Amri, SE, Ismail Rauf, SE, M.Si, Muzakir Tombolotutu, SE, M.Si, Muchtar Lutfi, SE, M.Si, Suparman, SE, M.Si, Yunus Kasim, SE, M.Si, Yunus Sading, SE, M.Si, Moh. Ahlis, SE, DEA, Risman, SE, M.Si, Edy Taqwa, SE, M.Si, Armin Muis, SE, M.Si, dan banyak lagi yang saya tidak sempat sebutkan namanya kami ucapkan terima kasih.

Pada kesempatan yang teramat berharga ini, saya persembahkan karya akademik ini kepada istri saya tercinta Siti Hasbia, dan anak saya Amalia Ramdaniyah. Perhatian mereka yang membawa saya sampai ke tahap seperti ini. Kepada ibu dan bapak kandung saya Hj. Baho Opu Suginna dan Andi Pasinringi (Alm.) serta mertua saya bapak Nurdin Zaenong (Alm.) dan ibu Hj. Surya Lakita saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Pada mimbar ini pula izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya Prof. Dr. H. Madukallang Fattah (Alm.) dan ibu Hj. Nuraini Andi Oja yang telah terlalu banyak berjasa dalam kehidupan saya. Untuk kakak Ahmad Ridwan, Andi Lagaligo, Andi Mattulada dan adik-adik yang telah memberikan banyak dorongan kepada saya, tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih.

Demikian pidato pengukuhan ini kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga Allah SWT melimpahkan nikmat dan anugerahNya kepada kita semua. Amin

RIWAYAT HIDUP

- I Data Pribadi** :
- Nama : Patta Tope
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Parangia 05.09.1965
NIP : 131 872 554
Pangkat/Golongan : IVA/Pembina
Alamat Rumah : Jalan Macan 12 94118 Palu Sulawesi Tengah Indonesia
(Tlp. 0451-456123 Fax 0451-422355)
(HP 0811456677)
(E-mail: Patta_Tope@Hotmail.Com)
Pattatope@Yahoo.Com
- Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Kampus Bumi Tondo Palu 94118 Sulawesi Tengah Indonesia
(Tlp. 0451- 429394)
(Fax 0451-422355-422844)
- Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu
- Ijazah Terakhir : Doctor rerum politiker (Dr. rer. pol.)
Bidang : Ilmu-Ilmu Ekonomi
Jurusan : Pembangunan
Bidang Keahlian : Ekonomi Publik dan Ekonomi Internasional
- II Pendidikan** :
- 1970-1976 : Sekolah Dasar Negeri Parangia Selayar
1977-1981 : Sekolah Menengah Pertama Batangmata Selayar
1981-1984 : Sekolah Menengah Atas Negeri I Ujung Pandang (Makassar)
- 1984-1989 : Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako
1993-1998 : Universitas Bw. München, Penerima Beasiswa DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst "German Academic Exchange Service")
- Juni 1998 : Promosi Doktor Di Universitas Bw. München, Fakultas Ekonomi dan Organisasi (Dr.rer.pol.)
- 2001-2002 : Post Doktoral di Di Universitas Bw. München „Steuerung der Kontrakt-Produktions-Firmen im Sinne außenwirtschaftlicher Absichten der Republik Indonesien“
- 01-08-2005 s/d 31-09-2005 : Post Doktoral di Di Universitas Bw. München „Die PD. Sulteng als Instrument zur Verfolgung staatlicher Interessen Zentralsulawesis“

III Riwayat Pekerjaan	:	
1990-Sekarang	:	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako
1999-2002	:	Staf Khusus Pembantu Rektor I Universitas Tadulako
1999-2001	:	Sekretaris Bidang Penerapan Hasil Penelitian pada LPPM Untad Palu
1999-2001	:	Wakil Ketua Tim Pengelola Center of Tropical Forest Margin (CTFM) Univ. Tadulako
2002-2004	:	Ketua Tim Pengelola Center of Tropical Forest Margin (CTFM) Univ. Tadulako
2001-Sekarang	:	Pengelola Pusat-Pusat Kajian pada Fakultas Ekonomi Untad (Staf Ahli Bidang Kebijakan Ekonomi Publik)
1999-Sekarang	:	Pengurus Pusat Ikatan Alumni Univ. Tadulako
2001-2005	:	Tim Ahli Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
2001-Sekarang	:	Tenaga Ahli Lembaga Penelitian UNTAD
2001-Sekarang	:	Ketua Pusat Kajian Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi Untad
2002-2005	:	Ketua IV Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sulawesi Tengah
2003-2005	:	Staf Ahli Kawasan Pengembangan Kapet Batui Sulawesi Tengah
2004-Sekarang	:	Ketua Program Studi Pengembangan Wilayah Pedesaan Program Pascasarjana Universitas Tadulako
2005-Sekarang	:	Anggota Dewan Riset Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
2005-Sekarang	:	Anggota Pokja KTI II
2006-Sekarang	:	Ketua II Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sulawesi Tengah
25 Mei 2006-Sekarang	:	Staf Ahli Komisi XI (Anggaran) DPR R.I.

IV. Buku, Makalah dan Hasil Penelitian

- 1 : Pertumbuhan Sektor Industri dan Peranannya dalam Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Menjelang PELITA V, Palu 1989
- 2 : Profil Sub Sektor Perkebunan Sulawesi Tengah, Palu 1990
- 3 : Die staatliche Erdölindustrie als Instrument zur Verfolgung außenwirtschaftlicher Interessen Indonesien, München 1998
- 4 : The infrastructure Implication on Social Economy Life in Lore Lindu National Park, Palu 2001
- 5 : Regional Autonomy and Regional Development in Indonesia, Bogor 2000
- 6 : Paradigma Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Rakyat Dalam Menyongsong Otonomi Daerah, Palu 2000
- 7 : Peranan Perbankan Khususnya Bank BNI Terhadap Usaha Kecil Sulawesi Tengah, Palu 2000
- 8 : Rencana Induk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batui Sulawesi Tengah (Rencana Strategis), Palu 2000
- 9 : Rencana Induk Kawasan Andalan Kolonodale dan Sekitarnya Provinsi Sulawesi Tengah, (Rencana Strategis), Palu 2000
- 10 : Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu 1999 (Anggota Tim Peneliti)
- 11 : Profil Investasi Kabupaten Dati II Donggala, Palu 1999 (Anggota Tim Peneliti)
- 12 : Evaluasi Manajemen Usaha PD Sul Teng, Palu 2000 (Anggota Tim Peneliti)
- 13 : Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Morowali, Palu 2001
- 14 : Studi Kawasan Teluk Palu, Palu 2001 (Anggota Tim Peneliti)
- 15 : Perspektif Otonomi Daerah di Sulawesi Tengah, Makalah Disampaikan pada seminar yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi bekerjasama dengan HMM, HIMIESPA dan HIMAKSI Tanggal 19 Februari 2000 di Pogombo Palu.
- 16 : Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Morowali 2001-2006 (Anggota Tim Penyusun)
- 17 : Pola Dasar Pembangunan Sulawesi Tengah 2001-2005 (Anggota Tim Penyusun)
- 18 : Program Pembangunan daerah Sulawesi Tengah 2001-2005 (Anggota Tim Penyusun)
- 19 : Otonomi Daerah dan Pembangunan Sulawesi Tengah, Dalam Jurnal Tadulako, April 2000
- 20 : Studi Potensi Pemekaran Wilayah KAPET Batui, Palu 2001
- 21 : Studi Implikasi Undang-Undang No. 25 tahun 1999 Terhadap Kabupaten Morowali, Kerjasama Fakultas Ekonomi Untad dengan Pemerintah Kabupaten Morowali, Tahun 2000 (Anggota Tim Peneliti)
- 22 : Sumber-Sumber Penerimaan PAD dan Efisiensi Pemanfaatan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan, Palu 2001
- 23 : Penyusunan Program Pembangunan Kapet Batui Sulawesi Tengah, Palu 2001

- 24 : Penelitian Pengembangan Kawasan Strategis Untuk 4 Kecamatan (Lokasi: Kecamatan Totikum, Kecamatan Buko, Kecamatan Lo Bangkurung, Kecamatan Tinangkung), Palu 2001
- 25 : Penyusunan Program Pembangunan Kapet Batui, Palu 2001
- 26 : Rencana Stratejik (Renstra) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006
- 27 : Format Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Sulawesi Tengah, Makalah Disampaikan pada Seminar Sehari „Peranan Perbankan Untuk Mengembangkan UKM Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Sulawesi Tengah” Tanggal 20 Juni 2002.
- 28 : Program Penguatan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, Materi Pelatihan Tehnik Evaluasi Diri, Kerjasama badan Pendidikan dan Latihan Propinsi Sulawesi Tengah Diklat dengan Pusat Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Palu 2002.
- 29 : Steuerung der Kontrakt-Produktions-Firmen im Sinne außenwirtschaftlicher Absichten der Republik Indonesien, München 2005
- 30 : Penyusunan Data Base untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buol, Palu 2002
- 31 : Penyusunan Data Base untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, Palu 2003
- 32 : Exit Strategi Program jarring pengaman Sosial Bidang Kesehatan Kabupaten Banggai, 2003
- 33 : Review Master Plan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui, Palu 2004
- 34 : Evaluasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Gakin di Sulawesi Tengah, Studi Kasus Kota Palu dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Palu 2004
- 35 : Ekonomi Perrdagangan Internasional, Palu 2004
- 36 : Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kabupaten Banggai Kepulauan, Palu 2004
- 37 : Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso, Palu 2005
- 38 : Ekonomi Publik, Palu 2005
- 39 : Die PD. Sulteng als Instrument zur Verfolgung staatlicher Interessen Zentralsulawesis München 2005
- 40 : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tolitoli, Tolitoli 2006
- 41 : Identifikasi Komoditi Unggulan Sulawesi Tengah, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional & Bazar Intermediasi di Palu pada tanggal 12 April 2006

V Pelatihan

- 1 : Mengikuti Training of Trainers (TOT) Manajemen Kebijakan Publik di Makassar Pada Tahun 2001
- 2 : Pelatihan Evaluasi Diri, Dewan Pendidikan Nasional DIKTI, September 2001
- 3 : Mengikuti Training of Trainers (TOT) Penatausahaan Keuangan Daerah bagi Calon Tenaga Pendamping Staf Pembukuan di Daerah yang Diselenggarakan Oleh Departemen Dalam Negeri Dari Tanggal 25 s/d 29 Agustus 2003 di Jakarta dan telah dinyatakan lulus untuk menjadi Tenaga Pendamping Staf Pembukuan di Daerah dalam Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
- 4 : Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan "Sistim Anggaran Berbasis Kinerja" yang Diselenggarakan oleh Pusat Studi Investasi dan Keuangan Bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta dari Tanggal 5 s/d 11 Juni 2004 Meliputi 50 Jam Pelatihan
- 5 : Training on Global Value Chain Analysis in Cacao, Fishery and Coconut, Dilaksanakan oleh UNIDO, Makassar 2004



Prof. Dr. rer. pol. PATTA TOPE, SE & KELUARGA